

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis isi dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa politisasi bantuan sosial termuat dalam film dokumenter “*Dirty Vote*” segmen 14 menit ke 00:35:20 dan 16-17 pada menit ke 00:40:40 – 00:53:00 dengan tiga modus seperti kenaikan anggaran bantuan sosial menjelang tahun pemilihan umum (pemilu), pengabaian data Kementerian Sosial, dan penyebaran bantuan sosial pada daerah-daerah yang menjadi wilayah pemenangan salah satu aktor politik.

Hal ini selanjutnya menunjukkan bahwa film sebagai suatu alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pada khalayak umum serta produk sosial, politik, dan budaya yang merefleksikan tentang realitas masyarakat telah berhasil memberikan gambaran terkait praktik politisasi bantuan sosial menjelang pemilihan umum tahun 2024 di Indonesia.

Adapun beberapa aktor politik yang terlibat dalam proses pendistribusian bantuan sosial antara lain Joko Widodo, Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto yang diduga modus-modus tersebut dilakukan untuk kepentingan elektoral dalam pemilihan umum (pemilu) 2024 mereka. Aktor-aktor tersebut ditemukan dalam film dokumenter “*Dirty Vote*” scene gambar jokowi yang berada pada kubu 02 pada menit ke 00:39:22, scene Zulkifli Hasan dalam acara pendistribusian bantuan sosial bersama PAN pada menit ke 00:34:27 – 00:34:35, dan scene Airlangga Hartarto dalam pendistribusian bantuan sosial di Lombok pada menit ke 00:34:40 – 00:35:08.

Selain itu, dari penelitian ini telah ditemukan adanya relasi patron-klien pada politisasi bantuan sosial dalam film dokumenter “*Dirty Vote*” yang dilakukan dalam proses pengelolaan sumber daya (pendistribusian bantuan sosial) yang dilakukan oleh Jokowi, Zulhas, dan Airlangga. Dimana ketiganya menggunakan relasi ini untuk memelihara loyalitas dari para penerima bantuan sosial agar mendapatkan timbal balik berupa dukungan suara pada kontestasi pemilihan umum tahun 2024.

Dengan ditemukannya relasi patron-klien dalam politisasi bantuan sosial ini, menunjukkan bahwa relasi patron-klien telah berimplikasi pada kemunduran demokrasi yang ditandai dengan tidak adanya keterlibatan publik pada proses pengelolaan sumber daya kesejahteraan yaitu pendistribusian bantuan sosial oleh Joko Widodo, Zulkifli Hasan, dan Airlangga Hartarto pada masyarakat penerima bantuan. Sehingga secara substansi demokrasi

telah mengalami kemunduran karena publik tidak dapat terlibat dalam upaya pencapaian kesejahteraan secara maksimal.

Serta, relasi patron-klien antara Joko Widodo, Zulkifli Hasan, dan Airlangga Hartarto dengan masyarakat penerima bantuan sosial justru digunakan guna menggalang dukungan suara dari masyarakat penerima bantuan sosial untuk memberikan suara mereka dalam kontestasi pemilihan umum (pemilu) 2024 di

Indonesia, bukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga hal ini pada akhirnya telah menunjukkan bahwa relasi patron-klien pada politisasi bantuan sosial berimplikasi pada kemunduran demokrasi. Hal ini dikuatkan juga dengan data milik *Freedom House* yang mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia telah mengalami kemunduran dari 62 menjadi 57 pada tahun 2024 berdasarkan indeks pengukuran yang ditetapkannya, dengan indeks hak politik pada 29/40 dan kebebasan sipil pada 28/60 dari skala pengukuran *Freedom House* atau dikatakan Indonesia berada pada posisi *partly free*.

